



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**bangga
melayani
bangsa**

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TULANG BAWANG**



Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou
Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang



[diskominfotulangbawang](#)



[Diskominfo Tulang Bawang](#)



[kominfotuba](#)



[Kominfo Tulang Bawang](#)

KATA PENGANTAR

Recana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari Program Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo selama 5 (lima) tahun.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, disiapkan guna merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan strategis tersebut diprediksi akan melatarbelakangi beberapa perubahan skema-skema perencanaan dalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran pembangunan yang disusun berdasarkan penganggaran terpadu (*unified budget*) menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja serta penyusunan program kerja yang berkesinambungan (*sustainable program*) berbasis kinerja.

Secara rinci Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 berisi kemajuan yang telah dicapai serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi pada masing-masing bidang di lingkungannya. Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta prioritas pembangunan yang akan ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan Kabupaten Tulang Bawang.

Tulang Bawang, September 2025
KEPALA DINAS,

NANAN WISNAGA, S.Sos., M.M
NIP. 19730908 200003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	10
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	10
2.1.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika	21
2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	26
2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	
42	
2.1.5. Mitra Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Memberikan	
Pelayanan	43
2.1.6. Kerjasama Daerah	43
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis	44
2.2.1. Permasalahan	44
2.2.2. Isu Strategis	45
BAB III TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tahun 2025-2029	51
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	54
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59

4.1.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika	59
4.2.	Dukungan Sub Kegiatan Renstra PD pada RPJMN 2025-2029..	89
4.3.	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra..	93
4.4.	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	96
BAB V PENUTUP.....		99
5.1.	Kesimpulan Penting Substansial.....	99
5.2.	Kaidah Pelaksanaan	99
5.3.	Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	21
Tabel 2.2 Klasifikasi ASN Berdasarkan Golongan.....	22
Tabel 2.3 Klasifikasi pegawai Berdasarkan Tingkat pendidikan.....	22
Tabel 2.4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	22
Tabel 2.5 Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika.....	23
Tabel 2.6 Teknologi Informasi / <i>Information Technology</i> (TI/IT)	25
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	28
Tabel 2.8 Anggaran dan Realiasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang	35
Tabel 2.9 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah	48
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029	52
Tabel 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Rensra Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang	56
Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.....	58
Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang	60
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang	73
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	87
Tabel 4.4 Sub kegiatan pada PD yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029	90

Tabel 4.5 Intervensi Perangkat Daerah Pada Arah Pembangunan Wilayah
Provinsi Lampung Dalam Rancangan Akhir RPJMN 2025-2029 93

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang 95

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang 97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah ... 3

Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dengan
Dokumen Perencanaan Lain 4

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tulang Bawang 21

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) menurut para ahli seperti Kerzner Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan. Menurut Robert N. Anthony perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun depan.

Berdasarkan pengertian para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rencana strategis adalah rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entitas. Sedangkan Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan kesetiap program jangka panjang selama beberapa tahun kedepan. Hasil dari proses perencanaan strategis berupa dokumen yang dinamakan *strategic plan* yang berisi informasi tentang program-program beberapa tahun yang akan datang.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah. Tugas Dinas Kominfo sebagai salah satu Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Oleh karenanya, Dinas Komunikasi dan Informatika pun juga diberikan amanat untuk menyusun penjabaran RPJMD dalam format jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun).

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dalam penyelenggaraan Pembangunan daerah memiliki fungsi yaitu, secara keseluruhan fungsi Rencana Strategis adalah memastikan bahwa organisasi mampu mencapai visi dan tujuan jangka panjangnya melalui perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi yang efektif. Melalui analisis lingkungan internal dan eksternal, organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan, mencegah masalah, serta mengelola sumber daya secara lebih efisien. Rencana strategis juga membantu meningkatkan kinerja organisasi dengan menciptakan hubungan yang jelas antara sasaran jangka pendek dan jangka panjang, serta mengoptimalkan proses operasional.

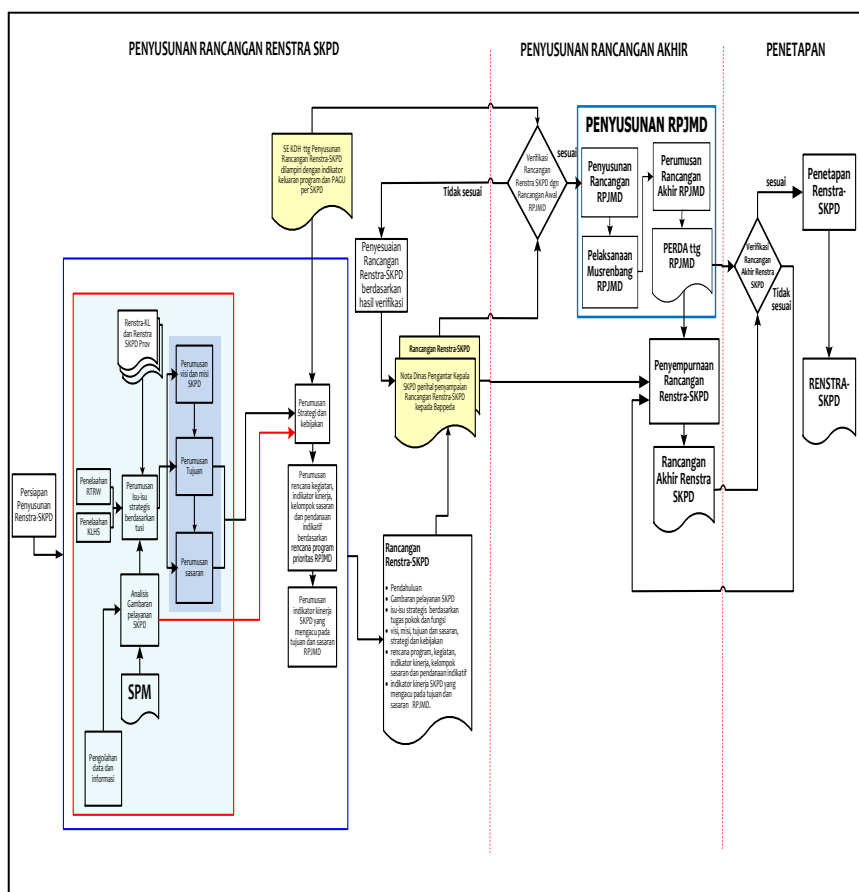
Amanat regulasi Renstra (Rencana Strategis) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 menekankan pada keselarasan dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta fokus pada penguatan infrastruktur digital, pengembangan SDM digital, perluasan layanan publik berbasis teknologi, dan peningkatan indeks SPBE (Sistem Pelayanan Publik Elektronik). Renstra ini juga menekankan pentingnya integrasi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam program prioritas pemerintah daerah, seperti digitalisasi dan pemerataan jaringan teknologi informasi.

Adapun Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang , berpedoman pada surat Edaran Kabupaten Tulang Bawang Nomor : B/000.7.2.2/1/V.1/TB/IV/2025, Tanggal : 24 April 2025, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut melalui tahapan sebagai berikut :

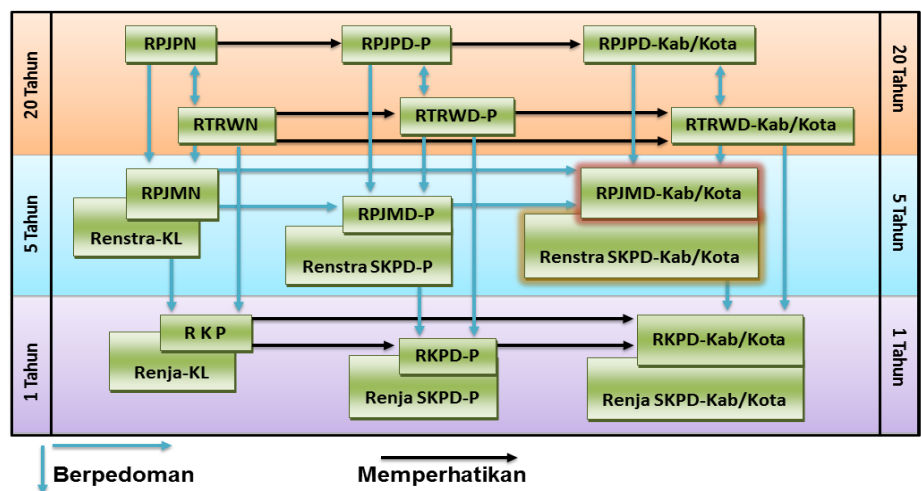
- a. Tahapan Persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan :
Pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi yang berkaitan.
- b. Tahapan Penyusunan rancangan Renstra, melalui kegiatan penyusunan rancangan awal Renstra, turut serta dalam kegiatan konsultasi publik Ranwal RPJMD 2025-2029, serta Forum PD/Lintas PD ;
- c. Penyusunan Rancangan akhir meliputi : verifikasi Bapeda dan reuiu Rancangan akhir Renstra oleh APIP/Inspektorat,dan
- d. Tahapan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Proses Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1



Gambar 1.1 Proses penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah

Keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada gambar 1.2



Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Dokumen Perencanaan Lain

Nilai strategi Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang mencakup rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas komunikasi dan Informatika

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Disamping itu juga merujuk pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Tujuan merujuk pada RPJMD serta kebijakan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut

:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2024;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dinas Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029;
20. Surat Edaran Nomor B/000.7.2.2/1/V.1/TB/IV/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun

2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

25. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang;

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan dan menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terutama terkait pengawasan, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dalam mengoordinasikan dan mengintegrasikan urusan yang terkait perangkat daerah;
4. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang adalah:

1. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan

- Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD;
2. Menjadi pedoman dalam implementasi visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
 3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan perangkat daerah dalam jangka 5 tahun;
 4. Memberikan arah dalam penyusunan program kerja dan anggaran di sektor Komunikasi dan Informatika;
 5. Sebagai acuan dalam pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta kebijakan strategis yang menjadi tolok ukur kinerja dinas/badan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun dengan sistematika yang telah ditetapkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi empat hal pokok yaitu: (1) latar belakang menguraikan tentang beberapa hal yang melatar belakangi disusunnya Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Tulang Bawang; (2) landasan hukum berisi dasar hukum yang melandasi pembuatan perubahan rencana strategis ini; (3) maksud dan tujuan berisi apa yang diharapkan dengan penyusunan rencana strategis; (4) sistematika penulisan berisi tata urutan laporan yang digunakan dalam penyusunan rencana strategis;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berisi gambaran pelayanan dan sumberdaya pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika serta data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi Dan Informatika disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) Tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan;

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi mengenai rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas, serta Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029, yang disesuaikan dan berpedoman kepada Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 – 2029;

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi program, kegiatan, subkegiatan dalam mencapai target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 merujuk pada IKU dan IKK Dinas Komunikasi dan Informatika yang sesuai berdasarkan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 dan juga berlandaskan RPJMN Tahun 2025-2029;

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan Rencana Strategis, kaidah pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Rincian jabatan dan tugas pokok serta fungsi dinas berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik, dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
 - b. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
 - d. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Statistik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
1. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi untuk masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai Tugas memimpin mengkoordinasikan dan Mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- 4) Penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan dinas; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas mempunyai perincian tugas :

- 1) Menetapkan rencana strategis dan rencana kerja memberikan pengarahannya dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik, memimpin, Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan Dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- 2) Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- 3) Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- 4) Melakukan pembinaan kepada bawahan;
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika/pihak yang terkait; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- 1) merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

- 2) menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 3) menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dan pada lingkup sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 4) merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
- 5) mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 6) merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;
- 7) merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kerumahtanggaan, kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 8) merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 9) merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 10) merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Badan;
- 11) merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 12) merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 13) merumuskan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 14) menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika; dan

- 15) melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh:

- 1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Kepala Subbagian Keuangan; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

a) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang, dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Penyiapan bahan kebijakan pengelolaan umum dan kepegawaian;
- 3) Pengelolaan administrasi surat menyurat, arsip, dan perpustakaan;
- 4) Pengelolaan kerumahtanggaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- 5) Pengelolaan dan pengendalian aset, sarana, dan prasarana;
- 6) Penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian;
- 7) Penyiapan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- 8) Penyiapan bahan zona integritas dan budaya kerja
- 9) Perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luasan kurang dari 5 (lima) hektare;
- 10) Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penghimpunan sasaran kinerja pegawai lingkup Dinas;
- 11) Pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

- b) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Subbagian Keuangan. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang administrasi keuangan dan perbendaharaan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Subbagian keuangan;
- 2) Melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 3) Melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 4) Melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dengan unit kerja lainnya yang terkait;
- 5) Menyusun bahan laporan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 6) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian keuangan; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai Tugas Pokok membantu kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi dan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ,

Uraian Tugas Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- 2) Melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- 3) Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- 4) Mengkoordinasikan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- 5) Menyelenggarakan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- 6) Mengoordinasikan pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media;
- 7) Menyelenggarakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- 8) Mengoordinasikan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah Kabupaten;
- 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang informasi dan komunikasi publik;
- 10) Melaksanakan dokumentasi kegiatan pemerintahan daerah dan/atau pimpinan daerah;
- 11) Melaksanakan dokumentasi aneka prestasi dan informasi strategis sebagai bahan publikasi pemerintah daerah;
- 12) Menyusun system dokumentasi dan inventarisasi informasi dalam bentuk file aneka media;
- 13) Menyusun Kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- 14) Menyusun Manajemen komunikasi krisis; dan
- 15) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana yang telah di jabarkan, KepalaBidang Informasi dan Komunikasi Publik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Bidang Aplikasi Informatika. Kepala Bidang Aplikasi Informatika mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, melaksanakan fungsi dan kegiatan di Bidang Aplikasi Informatika.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud), Uraian Tugas Kepala Bidang Aplikasi Informatika adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Aplikasi Informatika;
- 2) Melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Aplikasi Informatika;
- 3) Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan infrastruktur teknologi Aplikasi Informatika;
- 4) Merumuskan penatalaksanaan, pembinaan dan pengawasan nama domain dan sub domain Pemerintah Daerah Kabupaten;
- 5) Merumuskan perencanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan layanan jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah Kabupaten;
- 6) Merumuskan pelaksanaan pengawasan, dan pembinaan infrastruktur telekomunikasi;
- 7) Merumuskan pelaksanaan pengawasan dan monitoring menara telekomunikasi;
- 8) Menyelenggarakan pelayanan rekomendasi dan dukungan Pembangunan Menara telekomunikasi;
- 9) Merumuskan kebijakan pengembangan dan pengelolaan data dan integrasi sistem informasi;
- 10) Merumuskan pengembangan dan pengelolaan aplikasi pemerintahan, layanan publik, dan layanan bisnis;
- 11) Merumuskan kebijakan pengembangan aplikasi dan tatakelola sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- 12) Merumuskan pengembangan dan pengelolaan ekosistem

kabupaten cerdas (*smart city*);

- 13) Merumuskan pengembangan dan pengelolaan ekosistem sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- 14) Menyelenggarakan/melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Pembangunan aplikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten;
- 15) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Aplikasi Informatika; dan
- 16) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana telah dijabarkan, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala dengan titel latur Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi dan kegiatan di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Uraian Tugas Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- 2) Melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- 3) Merumuskan dan mengoordinasikan penyusunan kebijakan tata Kelola keamanan informasi;
- 4) Merumuskan dan mengoordinasikan pengelolaan sumber daya keamanan informasi;
- 5) Merumuskan dan mengoordinasikan pengamanan sistem

elektronik dan pengamanan informasi non elektronik;

- 6) Merumuskan dan mengoordinasikan penyediaan layanan keamanan informasi;
- 7) Merumuskan dan mengoordinasikan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten;
- 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana telah dijabarkan, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Statistik

Bidang Statistik dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Statistik. Kepala Bidang Statistik mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, melaksanakan fungsi dan kegiatan di Bidang Statistik.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Uraian Tugas Kepala Bidang Statistik adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Statistik;
- 2) Melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Statistik;
- 3) Merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten;
- 4) Mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyebarluasan data statistik sektoral;
- 5) Merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- 6) Merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan dalam pembangunan metadata statistik sektoral;

- 7) Mengkoordinasikan kebijakan dalam pengelolaan informasi geospasial;
- 8) Merumuskan perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur data statistik sektoral;
- 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Statistik;
- 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana telah dijabarkan, Kepala Bidang Statistik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang. UPTD sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

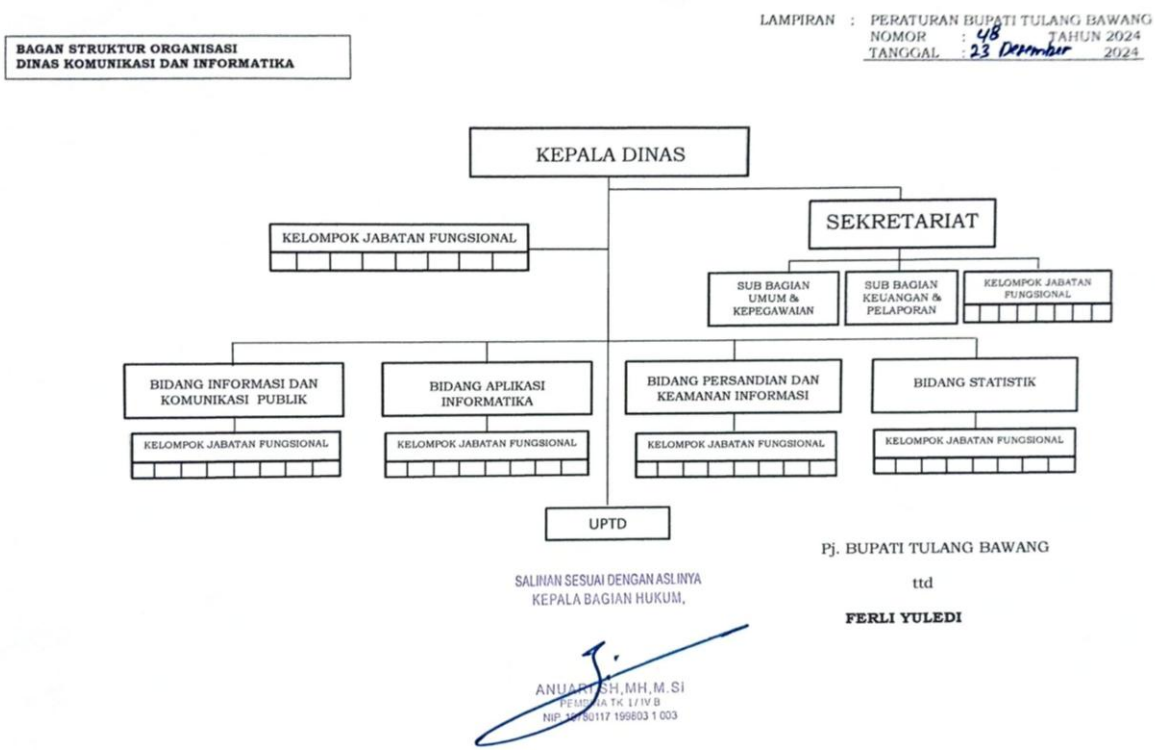
h. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada masing masing unit kerja dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas secara professional sesuai dengan literatur jabatan fungsionalnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat pimpinan Tinggi Pratama, pejabat Administrator atau Pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional;

Analisa kebutuhan jenis, jenjang dan jumlah personil Jabatan Fungsional yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas, dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun Gambar Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang selengkapnya dapat dilihat di Gambar 2.1 dibawah ini :



Sumber : Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 48 Tahun 2024.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang

2.1.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam Sub Bagian ini menjelaskan tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dalam menjelaskan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

a. Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan jumlah personil Dinas Komunikasi, Informatika adalah 40 orang, terdiri dari : 30 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 orang Tenaga Kontrak.

Tabel 2.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	ASN	30 Orang
2	Tenaga Kontrak	10 Orang
Jumlah		40 Orang

Berdasarkan pangkat dan golongan di Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu ada empat golongan I, II , III dan IV. Adapun Rincian penyebaran pangkat dan golongan PNS sebagai berikut:

Tabel 2.2 Klasifikasi ASN Berdasarkan Golongan

No	Jenis Kepangkatan	Jumlah
1	Golongan IV	8
2	Golongan III	31
3	Golongan II	1
4	Golongan I	-
Jumlah		40 Orang

Dalam hal tingkat pendidikan, Pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika rata-rata adalah S-1. Adapun data selengkapnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Klasifikasi pegawai Berdasarkan Tingkat pendidikan

NO	Jenis Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Doktor / S-3	-
2	Magister / S-2	12
3	Sarjana / S-I	14
4	Diploma	3
6	SLTA/SMA	10
7	SLTP/SMP	1
8	SD	
Jumlah		40 Orang

Dilihat dari jensi kelamin pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang terbagi menjadi 29 pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 11 pegawai berjenis kelamin perempuan, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Laki - Laki	29 Orang
2	Perempuan	11 Orang
Jumlah		40 Orang

b. Sarana dan Prasarana

Saat ini para pengguna data dan informasi dapat mengakses data dan informasi pembangunan pemerintah Kabupaten melalui fasilitas jaringan internet yaitu dengan mengakses *website*

resmi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan domain www.tulangbawangkab.go.id, website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dengan domain <http://diskominfo.tulangbawangkab.go.id/> dan email kominfo.tulangbawang@gmail.com.

Tabel 2.5 Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Ket
1	Kantor	1	Unit	Baik
2	Kendaraan Roda Empat	4	Unit	Baik
3	Kendaraan Roda Dua	4	Unit	2 Baik, 2 Rusak
4	Telivisi (smart tv)	4	Unit	Baik
5	Kursi Putar	7	Unit	Baik
6	AC Unit	14	Unit	9 Baik, 5 Rusak
7	Televisi	2	Unit	1 Baik, 1 Rusak
8	Gordyn	37	Unit	Baik
9	Rak Buku	1	Unit	Baik
10	Rak Tipi	1	Unit	Baik
11	Filing Cabinet	28	Unit	Baik
12	Lemari Arsip	3	Unit	Baik
13	Meja 1 Biro	9	Unit	Baik
14	Kursi putar	13	Unit	Baik
15	Kursi Putar kecil	3	Unit	Baik
16	Meja tamu	1	Unit	Baik
17	Kursi Tamu	7	Unit	Baik
18	G-LEN Sukiriti	1	Unit	Baik
19	Super fast	1	Unit	Baik
20	Meja 1/2 Biro	27	Unit	Baik
21	Kursi Lipat	30	Unit	Baik
22	Laptop	10	Unit	8 Baik, 2 Rusak
23	Komputer PC	36	Unit	14 Baik, 22 Rusak
24	Kursi Putar Besar	3	Unit	Baik
25	Mesin Ketik	1	Unit	Baik
26	Lemari ES	1	Unit	Baik
27	Hp opo reno 4	1	Unit	Rusak
28	Printer	10	Unit	Baik
29	Proyektor	1	Unit	8 Baik, 2 Rusak
30	Screen	1	Unit	Baik
31	Sound system	2	Unit	Baik
32	Stabiliser	1	Unit	Baik
33	GPS	1	Unit	Baik
34	Alat Ukur Radiasi	1	Unit	Baik
35	UPS	2	Unit	Baik
36	Sounderaft	1	Unit	1 Baik, 1 Rusak
37	Theodolite	1	Unit	Baik
38	Meja Panjang Kayu Kaca	1	Unit	Baik

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Ket
39	Kamera Video	2	Unit	
40	Kamera DSLR	3	Unit	Baik
41	Tripot Kamera	1	Unit	2 Baik, 1 Rusak
42	Flash Kamera Nikon	3	Unit	Kurang Baik
	dan Nisin		Unit	Baik
43	Filter Kamera	2	Unit	
44	Note book	1	Unit	Baik
45	Kamera Video	4	Unit	Baik
	(Handycam)		Unit	Baik
46	Tripot Kamera	1	Unit	
47	Lighting Video LED	4	Unit	Baik
48	Kamera DSLR	4	Unit	Baik
49	Proyektor	2	Unit	Baik
50	Mixer Multimedia	1	Unit	Baik
51	HP	2	Unit	Baik
52	Canon 6d+lesa	3	Unit	Baik
53	Tele 70200	1	Unit	Baik
54	DRON INSPRE2	1	Unit	Baik
55	1 set Kurs kayu/jok	1	Unit	Baik
56	Telivisi 65In	3	Unit	Baik
57	Web Cam	1	Unit	Baik
58	Tripod	4	Unit	Baik
59	Bricket Standung	1	Unit	Baik
60	Mixer	2	Unit	Baik
61	Mic	2	Unit	Baik
62	Spiker Aktif	4	Unit	Baik
63	Stan Tripod Spiker	4	Unit	Baik
64	Dell Onspiron 5490	3	Unit	Baik
65	Logitech Ptz Pro2	6	Unit	Baik
	Camera-Ap			Baik
66	Expansion	3	Unit	
67	Tropod Screen Focus	2	Unit	Baik
	Ms-96t			Baik
68	Samsung 75 Inch	2	Unit	
	Smart Tv4k			Baik
69	Lenovo Ideapad	2	Unit	
	S145-1 Iil			Baik
70	Sony Camborder	1	Unit	
	Hxr-Mc2500			Baik
71	Briket Standing Tv	2	Unit	
	65 Incih			Baik
62	Kamera Camcorder	4	Unit	
63	Tripod Camcorder	1	Unit	Baik
74	Cam Link 4k	2	Unit	Baik
	Broadcast			Baik
75	Wireless Video	2	Unit	
	Transmitter			Baik
76	Wireless Microphone	8	Unit	
	Shure 4 Ch			Baik
78	Audio Mixer	2	Unit	
	Soundcraft Sfx-8			Baik
79	Audio Spliter 3,5mm	4	Unit	

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Ket
	Jack Male			Baik
80	Kabel Head 200 M	1	Unit	
81	Jack Canon Male	16	Unit	Baik
82	Jack Canon Female	16	Unit	Baik
83	Jack Akai Mono	15	Unit	Baik
84	Kabel Nym 200 M	2	Unit	Baik
85	Terminal Listerik 5 Lubang	16	Unit	Baik
86	Steker Colokan Listri	20	Unit	
87	Kabel Hdmi 3m	10	Unit	Baik
88	Kabel Usb-C To Usb	4	Unit	Baik
89	Infokus Projector	2	Unit	Baik
90	Camera Canon Eos 6d Mark Ii With Lens 24-70mm	1	Unit	Baik
91	Kamera Canon Eos R100	3	Unit	Baik
92	Lensa Canon Tele	1	Unit	Baik
93	Baterai Camera	4	Unit	Baik
94	Flash Camera	4	Unit	Baik
95	Lensa Canon Ef	2	Unit	Baik
96	Baterai Rechargeable Aa	4	Unit	Baik
97	Baterai Charger	2	Unit	Baik
98	Ssd Eksternal	2	Unit	Baik
99	Baterai Drone	4	Unit	Baik
100	Asus Vivobook Go E1404fa-Fhd321	5	Unit	Baik
	canon pixma g3010			
101	printer	1	Unit	Baik
102	Videotron	2	Paket	Baik

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, didukung oleh sarana dan prasaranan lainnya dalam bentuk aset teknologi informasi, sebagai berikut:

Tabel 2.6 Teknologi Informasi / *Information Technology* (TI/IT)

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI
1	Local Area Network (LAN)	1 Network	Baik
2	Webiste	47	Baik
3	Server	4	Baik
4	Router	1	Baik
6	Switch	2	Baik

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI
7	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	Kurang Baik
8	Firewall	1	Baik
9	Aplikasi	4	Baik

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Yang dimaksudkan dengan Kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang periode sebelumnya atau berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Pada Sub Bagian ini, dibahas mengenai tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis Dinas sebelumnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang memiliki kewenangan dalam urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Dalam pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika dalam 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Urusan Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi.

Terkait dengan hal diatas maka peran, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan urusan dibidang komunikasi dan informatika sangatlah penting di dalam mengatasi permasalahan dan menjawab tuntutan perubahan dinamika masyarakat. Maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan *E-Government* yaitu dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Kabupaten Tulang Bawang.

b. Urusan Persandian

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan bidang persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang terkait pengamanan informasi internal Dinas Komunikasi dan Informatika dan pengamanan sistem jaringan informasi ada beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi, hal ini karena adanya perubahan fungsi dan penerapan sistem pengelolaan dan layanan operasional persandian. Dulu layanan operasional persandian hanya difokuskan pada pengamanan informasinya saja, namun sekarang disamping informasi juga harus mengamankan sistem jaringan informasi, sehingga bagi petugas persandian saat ini juga dituntut harus memahami dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi baik perangkat lunak maupun perangkat keras.

c. Urusan Statistik

Penyelenggaraan Urusan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang sangat berguna sebagai bahan perencanaan daerah dan juga termasuk data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang untuk menganalisis ekonomi makro daerah.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang perlu dilakukan perbandingan antara capaian kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika dengan kinerja yang dibutuhkan serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja layanan tersebut. Dalam menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika ada beberapa capaian kinerja yang telah terealisasi sesuai dengan target capaian indikator kinerja kunci (IKK) dan indikator kinerja Utama (IKU), sebagaimana yang kami sajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	62	63	64	71,10	71,18	77,28	69	71,06	71,66	72,35	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,91	2,01	2,11	-	-	0	0	2,09	-	-	0%	0%	98%	-	-
3.	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik	71	73	76	80,96	81,25	78,3	80,44	80,96	81	81,50	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Indeks Domain Kebijakan SPBE	-	-	-	2,65	2,98	-	-	-	3,00	3,70	-	-	-	100%	100%
5.	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	-	-	-	1,80	1,90	-	-	-	2,00	2,10	-	-	-	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6.	Indeks Domain Manajemen SPBE	-	-	-	1,05	1,10	-	-	-	1,09	1,00	-	-	-	100%	92%
7.	Indeks Domain Layanan SPBE	-	-	-	2,80	3,00	-	-	-	3,25	3,69	-	-	-	100%	100%
8.	Persentase Dinas Komunikasi dan Informatika yang terlayani pengamanan data dan informasi	-	-	-	60,85	61,63	-	-	-	71,43	100	-	-	-	100%	100%

Penyajian data di atas target - target Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang pada periode sebelumnya didapati bahwa masih ada target - target yang belum terealisasi sesuai apa yang diharapkan. Terdapat faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun belum berhasilnya pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

1. SAKIP adalah sistem yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja instansi pemerintah, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan kinerja. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan target nilai SAKIP dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator kinerja.

a. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja yaitu :

1. Nilai SAKIP yang belum muncul pada saat penyusunan LKJIP;
2. Kurangnya SDM;
3. Kurangnya kesadaraan koordinasi antar bidang / sekretariat internal dinas sehingga lambat dalam mengumpulkan data pendukung.

b. Strategi yang dilakukan dalam memecahkan hambatan yaitu :

1. Mengoptimalkan SDM yang sudah ada;
2. Koordinasi dilakukan dilakukan secara langsung dan secara terus menerus.

2. SPBE adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Ruang lingkup penilaian SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penerapan SPBE di instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE dalam berbagai domain seperti kebijakan, tata kelola, manajemen, dan

layanan. Indikator Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator kinerja.

a. Hambatan – hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja yaitu :

1. Kurangnya SDM yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi untuk Kurangnya koordinasi dalam merancang, menggunakan, dan mengevaluasi metode komunikasi, serta pemanfaatan informasi dan teknologi.
2. Kurangnya Anggaran dalam setiap penyelenggaraan pembangunan di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) selama ini masih menjadi salah satu penyebab e-Government seperti jalan di tempat dan belum dapat memberikan pelayanan internet dan intranet secara optimal;
3. Kurangnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam penilaian SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika bukanlah Supervisor ataupun operator dan hanya perangkat daerah pendukung walaupun memang cukup banyak data yang didominasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

b. Strategi yang dilakukan dalam memecahkan hambatan yaitu:

1. Melakukan Pengadaan barang dan jasa yang akan mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Melaksanakan pengadaan bandwidth yang terpusat pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan didistribusikan pada seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Tulang Bawang;
3. Peningkatan komitmen dan implementasi e-Government Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
4. Sudah adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan SPBE di Kabupaten Tulang Bawang.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Keterbukaan Informasi Publik adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi yang disediakan oleh badan publik. IKM ini mengukur seberapa baik badan publik memenuhi hak masyarakat atas

informasi, dengan mempertimbangkan harapan dan kebutuhan masyarakat. Indikator Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator kinerja.

a. Hambatan – hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja yaitu :

1. Masih belum dilakukan secara optimal dalam mengumpulkan datanya;
2. Jumlah responden yang kurang banyak;
3. Kurangnya SDM yang menguasai.

b. Strategi yang dilakukan dalam memecahkan hambatan yaitu:

1. Mengoptimalkan SDM yang sudah ada;
2. Koordinasi dengan tenaga ahli untuk menciptakan metode survey yang lebih optimal.

4. Indikator selanjutnya yaitu Indeks SPBE dimana pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika menjabarkan indeks SPBE kedalam 4 indikator domain pendukung SPBE yaitu Domain Kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE yang dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator kinerja.

a. Hambatan – hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja yaitu :

1. Pada Domain Kebijakan SPBE , tidak semua indikator pada domain kebijakan internal dilakukan reviu sehingga dapat dikatakan bahwa reviu yang dilakukan kurang menyeluruh.
2. Pada Domain Tata Kelola SPBE , Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang masih belum memiliki dokumen yang memuat Arsitektur SPBE yang didalamnya mencakup seluruh Referensi Arsitektur SPBE, dan Dokumen Masterplan e-Government (Peta Rencana SPBE) juga perlu disusun versi terbaru. Lalu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang belum memiliki dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembangunan /

pengembangan aplikasi yang sudah dikonsultasikan dan didokumentasikan secara formal, juga belum memiliki Dokumentasi operasional atau SOP penggunaan jaringan intra. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang belum memiliki penerapan kegiatan Tim Kolaborasi SPBE seperti Forum Satu Data, Forum Smart City, Forum Tim Asesor Internal, MoU, PKS, dan lain sebagainya

3. Pada Domain Manajemen SPBE, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang belum memiliki Peta Rencana SPBE dan program kerja/program kegiatan sehingga penerapan Manajemen SPBE dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang belum melaksanakan Audit TIK (Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan)
 4. Pada Domain Layanan SPBE , Walaupun memiliki bukti pemanfaatan layanan/aplikasi SPBE dan pemanfaatan layanan/aplikasi publik berbasis elektronik, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang belum melakukan reviu layanan secara berkala karena tidak ditemukan adanya bukti dukung berupa notulen hasil reviu atau evaluasi pelaksanaan layanan SPBE.
- b. Strategi yang dilakukan dalam memecahkan hambatan yaitu :
1. Pada Domain Kebijakan SPBE , Sudah ada Kebijakan Internal berupa Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang di dalamnya mencakup pengaturan tentang Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
 2. Pada Domain Tata Kelola SPBE , Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang merencanakan untuk melakukan perbaikan pada Proses Bisnis sebagai bentuk penerapan Inovasi Proses Bisnis, Juga akan mengoptimalkan Sistem Penghubung Layanan, akan tetapi belum ada

dokumentasi operasional dan pemanfaatan konkritnya dalam bukti dukung.

3. Pada Domain Manajemen SPBE, Merencanakan Penyusunan Peta Rencana SPBE dan program kerja/program kegiatan yang terarah dan terencana untuk aspek Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Kompetensi SDM SPBE, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE.
4. Pada Domain Layanan SPBE , Merencanakan pengembangan Layanan/aplikasi Data Terbuka yang lebih lanjut karena dalam bukti dukung tidak ditemukan adanya kapabilitas fungsi teknis interaktif.
5. Keamanan data dan informasi adalah serangkaian praktik, kebijakan, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi data dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, atau penghancuran yang tidak sah. Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, baik itu data digital maupun non-digital. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang menjalankan amanat data dan informasi dalam bentuk Email sanapati dan pengamanan tanda tangan elektronik srikandi. Indikator Persentase Perangkat Daerah yang terlayani pengamanan data dan informasi dimana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator kinerja.
 - a. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja yaitu :
 1. Kurangnya SDM yang menguasai;
 2. Kurangnya sistem hardware dan software yang memfasilitasi.
 - b. Strategi yang dilakukan dalam memecahkan hambatan yaitu :
 1. Mengoptimalkan SDM yang sudah ada;
 2. Telah dilakukan sosialisasi terkait pengamanan data dan informasi.

Tabel 2.8 Anggaran dan Realiasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2024 (6)	2020 (7)	2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)	2024 (11)	2020 (12)	2021 (13)	2022 (14)	2023 (15)	2024 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.283.418.152	5.277.625.774	4.314.833.676	4.253.535.400	4.792.247.048	4.584.249.675	4.613.580.163	4.061.405.787	3.846.900.709	4.175.236.030	78,28	87,42	94,13	90,44	87,12	-1,78%	-2,02%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	12.100.000	71.502.600	12.000.000	5.074.800	18.000.000	10.150.000	57.418.600	11.100.000	4.343.700	14.031.600	83,88	80,30	92,50	85,59	77,95	120,93%	136,79%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.100.000	71.502.600	12.000.000	5.074.800	18.000.000	10.150.000	57.418.600	11.100.000	4.343.700	14.031.600	83,88	80,30	92,50	85,59	77,95	120,93%	136,79%
Kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika	3.381.791.852	3.755.284.924	3.499.990.426	3.652.939.068	3.850.307.548	2.855.753.383	3.220.368.588	3.344.778.918	3.397.336.476	3.491.335.690	74,58	85,76	95,57	93,00	90,68	2,80%	5,24%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.200.000	15.000.000	12.000.000	8.473.500	15.000.000	24.200.000	14.052.500	8.014.500	6.193.500	9.790.100	100	93,68	66,79	73,09	65,27	-2,07%	-12,38%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.340.491.852	3.725.284.924	3.475.990.426	3.461.810.968	3.208.882.548	2.814.648.383	3.192.146.088	3.326.339.418	3.211.835.076	2.913.561.690	84,25	85,69	95,69	92,78	90,80	-0,57%	1,22%

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata – rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	17.100.000	15.000.000	12.000.000	8.129.600	15.000.000	6.755.000	14.170.000	10.425.000	4.782.900	8.808.900	39,5	94,47	86,88	58,83	58,73	3,99%	28,34%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0	0	174.525.000	611.425.000		0	0	174.525.000	559.175.000		0	0	100,00	91,45	125,16%	220,39%
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika		171.630.000	132.260.000	85.490.000	171.630.000		168.452.000	118.538.450	49.730.000	146.240.000		98,15	89,63	58,17	85,21	10,61%	35,46%
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		171.630.000	132.260.000	85.490.000	171.630.000		168.452.000	118.538.450	49.730.000	146.240.000		98,15	89,63	58,17	85,21	10,61%	35,46%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika		59.425.000	0	0	42.355.000		58.436.000	0	0	17.000.000		98,34	0	0	40,14	-100%	-100%
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		37.300.000	0	0	0		36.311.000	0	0	0		97,35	0	0	0	-100%	-100%
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		22.125.000	0	0	42.355.000		22.125.000	0	0	17.000.000		100,00	0	0	40,14	-100%	-100%
Kegiatan Administrasi Umum Dinas Komunikasi dan Informatika	1.889.526.300	1.219.783.250	670.583.250	510.031.532	497.171.100	1.728.496.292	1.108.904.975	586.988.419	395.490.533	317.218.740	92,76	90,91	87,53	77,54	63,80	-21,38%	-33,83%

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata – rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		113.200.000	133.200.000	133.200.000	114.000.000		77.492.587	122.750.469	105.238.237	86.405.729		68,46	92,16	79,01	75,79	0,81%	8,74%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	583.287.000	23.600.000	0	0	0	560.756.268	4.270.000	0	0	0	96,13	18,09	0	0	0	-97,97%	-99,61%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.306.239.300	1.082.983.250	537.383.250	376.831.532	383.171.100	1.167.740.024	1.027.142.388	464.237.950	290.252.296	230.813.011	89,39	94,84	86,39	77,02	60,24	-19,13%	-31,19%
Program Informasi dan Komunikasi Publik	7.802.302.700	6.862.564.800	9.776.461.000	3.352.692.500	5.785.649.000	7.632.795.950	6.470.489.400	9.662.777.352	2.751.493.210	4.855.867.700	77,47	94,29	98,84	82,07	83,93	7,45%	9,76%
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.802.302.700	6.862.564.800	9.776.461.000	3.352.692.500	5.785.649.000	7.632.795.950	6.470.489.400	9.662.777.352	2.751.493.210	4.855.867.700	77,47	94,29	98,84	82,07	83,93	7,45%	9,76%
Sub Kegiatan Pengeloaan Konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik	216.263.000	364.164.000	180.000.000	132.751.200	151.000.000	211.652.550	322.830.000	117.015.000	119.117.100	108.864.500	97,86	88,65	65,01	89,73	72,10	1,06%	-4,50%
Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	49.353.100	0	0	15.700.000	30.000.000	49.260.100	0	0	15.700.000	30.000.000	37,11	99,55	0	100,00	100,00	-2,97%	-4,45%
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	412.694.000	393.652.900	169.242.900	90.132.900	91.293.900	412.677.400	282.111.750	165.172.500	69.171.500	73.940.400	99,99	71,67	97,59	76,74	80,99	-21,41%	-31,07%
Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	6.937.621.500	5.444.052.800	9.066.680.000	2.984.823.000	5.362.007.000	6.838.846.800	5.213.828.900	9.036.112.850	2.466.525.260	4.589.825.100	98,57	95,77	99,66	82,64	85,60	11,51%	15,73%

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata – rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		393.768.100	262.778.100	75.948.100	51.348.100		386.225.950	248.504.002	52.778.250	42.050.500		98,08	94,57	69,49	81,89	-34,18%	-44,91%
Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	76.371.100	46.927.000	30.880.000	22.737.300	40.000.000	54.701.100	45.980.800	30.330.000	22.043.300	7.352.900	71,62	97,98	98,22	96,95	18,38	-4,63%	-35,98%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	110.000.000	220.000.000	66.880.000	30.600.000	60.000.000	65.658.000	219.512.000	65.643.000	6.157.800	3.834.300	59,68	99,78	98,15	20,12	6,39	14,44%	8,96%
Program Aplikasi Informatika	2.680.000.000	2.022.806.600	2.833.061.935	1.179.016.500	994.011.500	2.259.165.600	1.966.934.512	2.810.082.600	993.608.734	773.295.300	84,29	97,24	99,19	84,27	77,80	-11,70	-14,22%
Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.680.000.000	2.022.806.600	2.833.061.935	1.179.016.500	994.011.500	2.259.165.600	1.966.934.512	2.810.082.600	993.608.734	773.295.300	84,29	97,24	99,19	84,27	77,80	-11,70	-14,22%
Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.680.000.000	2.022.806.600	2.833.061.935	1.179.016.500	994.011.500	2.259.165.600	1.966.934.512	2.810.082.600	993.608.734	773.295.300	84,29	97,24	99,19	84,27	77,80	-11,70	-14,22%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	83.242.000	64.490.000	34.750.000	38.500.000	40.000.000	83.019.000	64.450.000	34.572.100	36.335.500	4.828.200	58,58	99,94	99,49	94,38	12,07	-10,79%	--37,58%

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata – rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	83.242.000	64.490.000	34.750.000	38.500.000	40.000.000	83.019.000	64.450.000	34.572.100	36.335.500	4.828.200	58,58	99,94	99,49	94,38	12,07	-10,79%	--37,58%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	83.242.000	64.490.000	34.750.000	38.500.000	40.000.000	83.019.000	64.450.000	34.572.100	36.335.500	4.828.200	58,58	99,94	99,49	94,38	12,07	-10,79%	--37,58%
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	0	33.130.000	23.000.000	13.800.000	30.000.000		29.394.700	19.614.100	13.055.400	17.326.000		88,73	85,28	94,60	57,75	11,70%	-11,33%
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	33.130.000	23.000.000	13.800.000	30.000.000		29.394.700	19.614.100	13.055.400	17.326.000		88,73	85,28	94,60	57,75	11,70%	-11,33%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	0	33.130.000	23.000.000	13.800.000	30.000.000		29.394.700	19.614.100	13.055.400	17.326.000		88,73	85,28	94,60	57,75	11,70%	-11,33%

Dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dalam periode 2020 – 2024 secara rata-rata terdapat penurunan anggaran di tiap tahunnya sehingga ada beberapa kegiatan terdapat kendala dalam pelaksanaan output kegiatannya. Secara rinci, dari penyajian Tabel Anggaran dan Realiasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun dalam kurun Waktu 2020 - 2024 dapat dikatakan baik yaitu pada tahun 2020 sebesar 91,86, tahun 2021 sebesar 92,18, tahun 2022 sebesar 97,68, tahun 2023 sebesar 86,47 dan pada tahun 2024 sebesar 84,41. Dalam hal ini, dikatakan baik apabila persentase rasio di atas 80% (delapan puluh persen).
2. Mengkaji dari realisasi per program kegiatan dan sub kegiatan, jika dilihat dari tingkat realisasi program maka tingkat realisasi program yang terbaik yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan tingkat realisasi secara konsisten diatas 85%, sedangkan program yang realisasinya kurang baik yaitu Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan tingkat realisasi pada tahun 2024 sebesar 12,07 %. Pada tingkat realisasi per kegiatan, kegiatan yang memiliki tingkat realisasi anggaran paling baik yaitu Kegiatan Administrasi Keuangan dengan tingkat realisasi konsisten diatas 85 %, sedangkan tingkat realisasi kegiatan yang terendah yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota dengan tingkat realisasi pada tahun 2024 sebesar 12,07%. Selanjutnya pada tingkat Sub kegiatan yang memiliki realisasi anggaran paling baik dan konsisten yaitu selalu di atas 80% yaitu Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media sedangkan untuk ub kegiatan yang memiliki tingkat realisasi yang kurang baik yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan tingkat realisasi sebesar 18,09 % pada tahun 2021 dan tahun selanjutnya tidak dianggarkan.
3. Rata – rata pertumbuhan anggaran dan realisasinya dalam kurun waktu 2020-2024 yaitu jika dilihat dari rata – rata pertumbuhan anggaran yang paling besar yaitu pada sub kegiatan Penyediaan

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar 125,16 % sedangkan rata – rata realisasi sebesar 220,39% dan rata – rata pertubuhan yang paling kecil yaitu pada Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sebesar -100% juga rata – rata realisasi sebesar -100%.

4. Faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah melalui jumlah dan kualitas personil (Sumber Daya Manusia), progres pelaksanaan program dan sarana dan prasarana kantor. Dimana, dari faktor tersebut menjadi hambatan dan memerlukan strategi dalam pemecahannya. Beberapa hambatan dan strategi yang ditemui dijelaskan yaitu sebagai berikut :

- a. Hambatan-hambatan yang ditemui adalah :

1. Sumber daya manusia yang menguasai bidang teknologi informatika bidang statistik dan persandian masih sangat terbatas, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum dapat berjalan dengan optimal. Diharapkan dengan adanya dukungan SDM bidang komunikasi informatika statistik dan persandian yang handal dan menguasai teknologi informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat lebih mampu memberikan pelayanan dalam menyajikan informasi kegiatan Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang;
2. Terdapat jabatan struktural ataupun fungsional yang belum terisi atau sering terjadi pergantian pejabat struktural ataupun fungsional yang menduduki jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika tidak memiliki latar belakang teknologi informatika atau mungkin kompetensi yang tidak sesuai, sehingga terjadi kekosongan keahlian pejabat yang menguasai teknologi informatika statistik dan persandian sehingga diperlukan waktu dan pembelajaran baru bagi pejabat tersebut untuk menguasai tupoksinya masing-masing;
3. Prasarana dan sarana kerja yang kurang mendukung dan representatif untuk bekerja maupun memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dan publik. Baik sarana di

bidang teknologi informatika statistik dan persandian maupun kendaraan operasional pendukung.

4. Koordinasi yang masih belum optimal di internal OPD yang menyebabkan lambatnya atau terhambatnya kinerja OPD.
- b. Strategi pemecahan dan rencana tindak lanjut yang telah dan akan dilaksanakan, adalah :
1. Selalu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tupoksi dengan harapan pegawai mengetahui dengan pasti dan dapat melaksanakan tupoksinya masing-masing;
 2. Guna mendukung kelancaran pelayanan, diharapkan dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang serta fasilitasi kebutuhan operasional OPD.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kelompok Sasaran Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang pada periode 2025-2029 untuk 5 (lima) tahun yang akan datang, antara lain :

Organisasi Masyarakat/Lembaga Organisasi masyarakat yang ikut bekerjasama dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, terutama dalam pencapaian sasaran yang terdiri dari Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika, Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat, Meningkatnya pengelolaan data statistik sektoral yang akurat dan terintegrasi dan Meningkatnya tata Kelola persandian dan keamanan informasi.

Organisasi masyarakat yang ikut mendukung pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain : Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), Relawan TIK, Media Online, Media Cetak dan Media Elektronik serta Komisi Penyiaran Daerah Tulang Bawang.

2.1.5. Mitra Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Memberikan Pelayanan

Pelayanan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau konsumen. Pelayanan bisa bersifat fisik, seperti interaksi langsung dengan orang lain atau mesin, atau bisa juga tidak berwujud, seperti penyediaan jasa.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dalam memberikan pelayanan bermitra dengan berbagai sektor, peran mitra dalam pelayanan yaitu sebagai penyaluran dan diseminasi informasi dan keterbukaan informasi publik.

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Pelayanan yang dijalankan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dalam memberikan pelayanan bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berupa memberikan layanan internet Wifi Publik, dimana wifi publik tersebar di 6 titik yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat.

Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika juga memberikan pelayanan dalam pengelolaan website Kabupaten Tulang Bawang untuk mempermudah penyebaran informasi.

b. Jurnalis dan Media

Jurnalis dan media dianggap sebagai mitra kerja dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Mereka memiliki fungsi yang sama dengan Kominfo, yaitu memberikan pelayanan dan menyampaikan informasi kepada publik.

2.1.6. Kerjasama Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan beberapa kerjasama Pemerintah Daerah dengan beberapa media terkait penyampaian informasi daerah seperti wartawan media cetak, media online maupun media elektronik yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang diperbaharui setiap tahunnya. Media yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melalui dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 jumlah media elektronik yang

bekerjasama sebanyak 4 (empat) media, dan media cetak harian sebanyak 11 (sebelas) media, serta 68 (enam puluh delapan) media online yang bekerjasama.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan

Permasalahan merupakan kesenjangan atau gap yang terjadi antara kinerja yang dicapai atau kondisi riil yang terjadi saat ini dengan rencana atau standar yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Kesenjangan atau gap tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat dan faktor pendorong yang terjadi.

Dalam mencapai peran yang diharapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang berusaha mengidentifikasi permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dibagi ke dalam 3 Urusan yang diampu yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian.

a. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Perlu optimalisasi Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana dalam pengelolaan website Kabupaten Tulang Bawang, sehingga ketersediaan data lebih lengkap dan terupdate secara berkala;
- 2) Belum optimalnya pemberian informasi terkait program dan kegiatan pemerintah daerah yang disampaikan ke masyarakat;
- 3) Masih rendahnya layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

b. Urusan Statistik

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Statistik, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya ketersediaan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
- 2) Penerapan single data melalui aplikasi satu data Kabupaten Tulang Bawang belum optimal.

c. Urusan Persandian

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Persandian, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Sertifikasi keamanan informasi standar nasional belum terlaksana;
- 2) Penggunaan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik di perangkat daerah belum berjalan; dan
- 3) Tingkat keamanan informasi pemerintah belum optimal.

2.2.2. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan review terhadap faktor-faktor yang terkait dengan permasalahan yang ditemukan, maka isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 bisa diidentifikasi sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Wilayah

Penggunaan teknologi dan inovasi dapat memainkan peran

penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan infrastruktur. Dengan demikian, peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah dapat tercapai, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan aksesibilitas, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah

Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah merupakan isu penting yang berfokus pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Dengan tata Kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang optimal, pelayanan publik dapat ditingkatkan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat diperkuat, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta inklusif dapat tercapai. Untuk itu, diperlukan reformasi birokrasi yang mendalam, penerapan teknologi

3. Keterbukaan Informasi dan Transparansi.

Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat. Masyarakat yang secara bertahap kian maju dan berkembang dalam berbagai pola pemikirannya akan menuntut tentang berbagai hal termasuk tentang kemudahan akses informasi yang dibutuhkan mereka. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat senantiasa berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan perkembangan kehidupannya;

4. Layanan Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau layanan Online. Penyusunan master plan TIK di Kabupaten Tulang Bawang. Layanan masyarakat yang termasuk urusan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan dilayani berbasis TIK. Layanan masyarakat yang semula secara manual, misalnya perijinan, pendapatan daerah, pengadaan barang/jasa dll secara bertahap akan dilayani berbasis TIK;

5. Penguatan data center yang menjadi pusat data yang aman dan handal serta pembangunan sistem aplikasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;

6. Keterjangkauan dan akses informasi yang merata. Akses informasi khususnya yang disampaikan melalui media digital

(internet) masih relatif terbatas bila dikaitkan dengan area wilayah dan jumlah penduduk Tulang Bawang. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, tuntutan akan fasilitas akses informasi di berbagai daerah semakin besar;

Tabel 2.9 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
• Bonus demografi dengan dominasi penduduk usia produktif yang dapat menjadi motor pembangunan;	• Perlu optimalisasi Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana dalam pengelolaan website Kabupaten Tulang Bawang, sehingga ketersediaan data lebih lengkap dan terupdate secara berkala • Belum optimalnya pemberian informasi terkait program dan kegiatan pemerintah daerah yang disampaikan ke masyarakat	• Belum optimalnya kolaborasi lintas sector dan pemangku • kepentingan dalam tata kelola pembangunan berkelanjutan dan penguatan kapasitas kelembagaan lingkungan.	• Demografi global; • Perkembangan teknologi.	• Masih Rendahnya Produktivitas ; • Rendahnya kualitas sumber daya manusia; • Tata Kelola dan akuntabilitas pemerintah	• Belum optimalnya pengembangan kawasan ekonomi baru berbasis eco-city yang terintegrasi dan berkelanjutan; • Peran Iptek dan Inovasi untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi.	• Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Wilayah • Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah • Keterbukaan Informasi dan Transparansi.
• Keberadaan industri- industri yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru; • Potensi jaringan transportasi darat, sungai, dan laut sebagai penghubung distribusi barang dan jasa;	• Masih rendahnya layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi. • Masih rendahnya ketersediaan statistik sektoral di lingkungan	• Belum optimalnya kolaborasi lintas sector dan pemangku • kepentingan dalam tata kelola pembangunan berkelanjutan dan penguatan kapasitas kelembagaan lingkungan	• Persaingan sumber daya alam; • Geopolitik dan geoeкономи; • Perkembangan teknologi.	• Tata Kelola dan akuntabilitas pemerintah; • Masih Rendahnya Produktivitas .	• Belum optimalnya pemanfaatan ruang fiskal dalam mendukung pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan; • Belum optimalnya ketahanan dan kemandirian energi untuk	• Layanan Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau layanan Online.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
• Dukungan program nasional dan provinsi dalam pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, energi, dan telekomunikasi.	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang; • Penerapan single data melalui aplikasi satu data Kabupaten Tulang Bawang belum optimal. • Sertifikasi keamanan informasi standar nasional belum terlaksana; • Penggunaan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik di perangkat daerah belum berjalan; dan				mendukung keberlanjutan pembangunan daerah; • Belum optimalnya pengembangan kawasan ekonomi baru berbasis eco-city yang terintegrasi dan berkelanjutan; • Integritas dan Efektivitas Birokrasi yang belum optimal	• Penguatan data center yang menjadi pusat data yang aman dan handal serta pembangunan sistem aplikasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang; • Keterjangkauan dan akses informasi yang merata.
• Dukungan regulasi nasional terkait reformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, dan penguatan keuangan daerah • Ketersediaan SDM aparatur yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan	• Tingkat keamanan informasi pemerintah belum optimal.	• Rendahnya integrasi aspek lingkungan dalam perencanaan pembangunan sektoral, termasuk dalam pengelolaan Kawasan strategis dan pertumbuhan wilayah; • Belum optimalnya kolaborasi lintas sector dan	• Geopolitik dan geoeкономи; • Perkembangan teknologi; • Tata kelola keuangan global; • Urbanisasi dunia	• Tata Kelola dan akuntabilitas pemerintah; • Masih Rendahnya Produktivitas ; • Krisis lingkungan;	• Belum optimalnya pemanfaatan ruang fiskal dalam mendukung pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan; • Integritas dan Efektivitas Birokrasi yang	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
dan pendidikan; • Dukungan teknologi digital untuk egovernment, ebudgeting, dan system informasi public;		pemangku kepentingan dalam tata kelola pembangunan berkelanjutan dan penguatan kapasitas kelembagaan lingkungan.			belum optimal; • Belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok terlanjar;	

BAB III

TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika secara keseluruhan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika harus sejalan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Dinas Komunikasi dan Informatika yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya. Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	NSPK: Norma • Pengelolaan Informasi Publik dan Hubungan Media dan Komunikasi Publik • Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) • Keamanan Informasi dan Layanan Pemerintahan Elektronik • Pengelolaan dan Integritas Data • Pengamanan Informasi dan Tanda Tangan Elektronik Standar • Penyusunan dan Perumusan Kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian; • Pengelolaan E-Government dan Aplikasi Informatika; • Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; • Pengelolaan Data Statistik dan pengamanan data Persandian.	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Akuntabel dan Berbasis Digital		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah	63,00	66,00	70,00	75,00	78,00	80,00	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	71,26	71,35	71,50	72,05	72,30	73,10	
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,28	-	-	-	-	-	
				Indeks Pemerintahan Digital (PemDi)	-	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	

No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Prosedur • Pelayanan Informasi Publik (PPID) • Pengaduan Masyarakat (SP4N-LAPOR & Hotline) • Layanan Aplikasi, Statistik, dan Sandi • Pelayanan Umum/Sekretariat Kriteria • Melaksanakan administrasi dinas, penyusunan program kerja, pengelolaan surat-menyurat, keuangan, serta sarana dan prasarana • Mengelola komunikasi publik, pelayanan informasi, pemberdayaan media, dan jejaring komunikasi social • Mengembangkan infrastruktur TIK, aplikasi pemerintahan (e-government), pengelolaan domain, dan tata kelola data elektronik. • Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data statistik sektoral. • Melaksanakan pengamanan informasi pemerintah, tata kelola keamanan siber, dan persandian daerah. Sasaran RPJMD : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Akuntabel dan Berbasis Digital		Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	95,50	96,20	97,00	97,70	98,40	99,00	
			Meningkatnya Kualitas Implementasi e-Government	Domain Layanan SPBE	3,70	-	-	-	-	-	
				Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PemDi)	0,00	3,10	3,25	3,46	3,52	3,76	
			Meningkatnya Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,21	2,37	2,53	2,71	2,90	3,10	
			Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Siber dan Sandi	2,40	2,70	3,00	3,30	3,60	3,90	

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada sasaran ditetapkan indikator tujuan/sasaran yang akan dijadikan sarana /instrumen pengukuran, jumlah indikator tujuan/sasaran untuk mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas komunikasi dan Informatika adalah sebanyak 3 (tiga) indikator tujuan dan 5 (lima) indikator sasaran.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

a. Strategi

Strategi adalah rencana atau metode yang cermat, siasat yang cerdas, atau seni dalam merancang dan menggunakan rencana atau siasat untuk mencapai sasaran tertentu. Strategi dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang disusun untuk mencapai tujuan dalam 5 Tahun kedepan.

Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed- management*) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, dan merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan meliputi optimalisasi sumber daya, pentahapan, penentuan lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.

b. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman yang mengarahkan rumusan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan, serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ia berfungsi sebagai panduan untuk menentukan prioritas kerja dan mewujudkan visi serta misi pembangunan.

Arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang merupakan rangkaian kerja penjabaran misi Pemerintah Daerah yang selaras dengan strategi untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah yang dilaksanakan secara bertahap dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.

Dengan arah kebijakan yang tepat, diharapkan Bidang Komunikasi

Informatika, Statistik dan Persandian akan berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat informasi yang Mandiri, Maju dan Sejahtera dengan Pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Tulang Bawang.

Kemudian, untuk menerangkan mengenai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang secara menyeluruh dimana menunjukkan relevansi dan konsistensi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029 dapat ditampilkan dalam Tabel 3.2. di bawah ini :

Tabel 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Rensra Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang

NO	OPERASIONALISASI NSPK	STRATEGI RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ARAH KEBIJAKAN RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KETERANGAN
	NSPK : Norma • Pengelolaan Informasi Publik dan Hubungan Media dan Komunikasi Publik • Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) • Keamanan Informasi dan Layanan Pemerintahan Elektronik • Pengelolaan dan Integras Data • Pengamanan Informasi dan Tanda Tangan Elektronik Standar • Penyusunan dan Perumusan Kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian; • Pengelolaan E-Government dan Aplikasi Informatika; • Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; • Pengelolaan Data Statistik dan pengamanan data Persandian. Prosedur	Mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis digital dan terpadu	• Pengembangan sistem layanan publik terintegrasi berbasis teknologi informasi (SPBE) • Peningkatan infrastruktur dan keamanan teknologi informasi dalam pelayanan public • Fasilitasi kemudahan akses layanan melalui kanal digital yang responsif dan inklusif	• Meningkatkan komitmen pimpinan dan stekholder dalam implementasi SPBE • Meningkatkan aplikasi yang terintegrasi • Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK • Meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola SPBE • Meningkatkan integrasi aplikasi layanan • Meningkatkan layanan pengaduan elektronik • Meningkatkan keterbukaan badan publik • Meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi publik • Penyusunan daftar data	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	STRATEGI RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ARAH KEBIJAKAN RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KETERANGAN
	• Pelayanan Informasi Publik (PPID) • Pengaduan Masyarakat (SP4N-LAPOR & Hotline) • Layanan Aplikasi, Statistik, dan Sandi • Pelayanan Umum/Sekretariat Kriteria • Melaksanakan administrasi dinas, penyusunan program kerja, pengelolaan surat-menyurat, keuangan, serta sarana dan prasarana • Mengelola komunikasi publik, pelayanan informasi, pemberdayaan media, dan jejaring komunikasi social • Mengembangkan infrastruktur TIK, aplikasi pemerintahan (e-government), pengelolaan domain, dan tata kelola data elektronik. • Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data statistik sektoral. • Melaksanakan pengamanan informasi pemerintah, tata kelola keamanan siber, dan persandian daerah. Sasaran RPJMD : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Akuntabel dan Berbasis Digital			dan metadata statistik sektoral • Melaksanakan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah • Meningkatkan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian daerah • Meningkatkan fasilitas sarana pendukung keamanan informasi di setiap Dinas Komunikasi dan Informatika • Optimalisasi kerjasama yang dilakukan dengan mitra kerja kelembagaan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan di bagi kedalam tahapan pembangunan tahunan, dimana prioritas pembangunan tahunan bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah di tetapkan. Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dapat di sajikan seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan transformasi layanan publik berbasis digital	Peningkatan transformasi layanan publik berbasis digital	Akselerasi transformasi layanan publik berbasis digital	Pemantapan transformasi layanan publik berbasis digital	Perwujudan transformasi layanan publik berbasis digital
Penguatan layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Peningkatan layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Akselerasi layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Pemantapan layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Perwujudan layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan
Penguatan keamanan informasi pemerintah daerah	Peningkatan keamanan informasi pemerintah daerah	Akselerasi keamanan informasi pemerintah daerah	Pemantapan keamanan informasi pemerintah daerah	Perwujudan keamanan informasi pemerintah daerah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NSPK: Norma • Pengelolaan Informasi Publik dan Hubungan Media dan Komunikasi Publik • Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) • Keamanan Informasi dan Layanan Pemerintahan Elektronik • Pengelolaan dan Integritas Data • Pengamanan Informasi dan Tanda Tangan Elektronik Standar • Penyusunan dan Perumusan Kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian; • Pengelolaan E-Government dan Aplikasi Informatika; • Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; • Pengelolaan Data Statistik dan pengamanan data Persandian. Prosedur	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Akuntabel dan Berbasis Digital				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika		
			Meningkatnya dukungan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tepat waktu (%)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
• Pelayanan Informasi Publik (PPID) • Pengaduan Masyarakat (SP4N-LAPOR & Hotline) • Layanan Aplikasi, Statistik, dan Sandi • Pelayanan Umum/Sekretariat Kriteria • Melaksanakan administrasi dinas, penyusunan program kerja, pengelolaan surat-menyurat, keuangan, serta sarana dan prasarana • Mengelola komunikasi publik, pelayanan informasi, pemberdayaan media, dan jejaring komunikasi social • Mengembangkan infrastruktur TIK, aplikasi pemerintahan (e-government), pengelolaan domain, dan tata kelola data elektronik. • Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data statistik sektoral. • Melaksanakan pengamanan informasi pemerintah, tata kelola keamanan siber, dan persandian daerah. Sasaran RPJMD : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif,				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Meningkatnya penatausahaan administrasi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Akuntabel dan Berbasis Digital						ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	
				Meningkatnya kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melakukan tugas jabatannya	Terlaksananya administrasi kepegawain Dinas Komunikasi dan Informatika (%)	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET ·
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya Penatausahaan administrasi barang milik daerah	Persentase penatausahaan administrasi barang milik daerah yang dilaksanakan (%)	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya	Jumlah Paket Peralatan	Sub Kegiatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya fasilitas kunjungan tamu Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya jangka waktu pengoperasian barang milik daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di fasilitasi (%)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Dinas Jabatan			
				Meningkatnya jumlah pengadaan barang penunjang urusan milik daerah	Persentase pengadaan barang penunjang urusan milik daerah yang dilaksanakan (%)	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		
					Indeks Pemerintahan Digital (PemDi)		
		Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik			Indeks Keterbukaan Informasi Publik		
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) (%)	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Daerah Kab. Tulang Bawang			
				Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Sub Kegiatan Relasi Media	
				Tersedianya pelayanan informasi publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	
				Terlaksananya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
				Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
				Terlaksananya Diseminasi Infomasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Sub Kegiatan Diseminasi Informasi	
				Terlaksananya	Jumlah Konten Informasi	Sub Kegiatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penyusunan Konten	Publik	Penyusunan Konten	
		Meningkatnya Kualitas Implementasi e-Government			1. Domain Layanan SPBE 2. Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks Pemerintahan Digital (PemDi)		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Website Aktif (%)	Program Aplikasi Informatika	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan e-government(%)	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
				Terlaksananya	Jumlah Dokumen	Sub Kegiatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET ·
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
				Terlaksananya Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
				Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Tulang Bawangi Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten Tulang Bawangi Cerdas	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
				Terlaksananya Penyediaan Akses Internet	Jumlah PD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh dinas	Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet	
		Meningkatnya Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		
			Terciptanya		Persentase OPD yang	Program	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)		menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar serta cakupan ketersediaan data dasar pembangunan (%)	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
				Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah Kab. Tulang Bawang	Persentase Perangkat Daerah yang Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten Tulang Bawang (%)	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Sub Kegiatan Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	
				Terlaksananya Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Sub Kegiatan Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral	
				Meningkatnya Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
					Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Siber		
		Meningkatnya Pengamanan					

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Informasi Pemerintah Daerah			dan Sandi		
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
				Meningkatnya Keamanan informasi milik pemerintah daerah Kab. Tulang Bawang melalui penyelenggaraan persandian	Persentase Data dan Sistem Informasi milik Pemerintah Daerah yang di amankan sesuai dengan prinsip manajemen keamanan informasi (%)	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya keamanan informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah Laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
				Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Sub Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET ·
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan		Analisis Kebutuhan	
				Terlaksananya Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam visi dan misi dalam RPJMD 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, maka disusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada kerangka pendanaan pembangunan dan program Dinas Komunikasi dan Informatika di dalam RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki beberapa program prioritas yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Informasi Dan Komunikasi Publik;
- c. Program Aplikasi Informatika;
- d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- e. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Untuk mendukung Program prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, didukung oleh 12 (dua belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub kegiatan dimana penjabaran sasaran strategis menjadi sasaran antara dengan indikator kinerja masing-masingnya serta uraian ke program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan nomenklatur yang terdapat pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dan Kepmendagri 900.1.15.53406 Tahun 2024.

**Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tulang Bawang**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PEGAWAI (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SAT UAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai	71,18	71,26		71,35		71,50		72,05		72,30		73,10		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.792.247.048		4.860.932.442		5.146.904.458		5.265.283.261		5.386.384.776		5.510.271.625		5.637.007.873	
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Pers en	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.000.000		10.167.600		25.000.000		25.575.000		26.163.225		26.764.979		27.380.574	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Pers en	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0		0		15.000.000		15.345.000		15.697.935		16.058.988		16.428.344	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0		0		12 Dok		12 Dok		12 Doku		12 Dok		12 Doku		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PEGAWAI (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SAT UAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Daerah						um en		ume n		men		ume n		men		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			18.000.000		10.167.600		10.000.000		10.230.000		10.465.290		10.705.992		10.952.229	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Lap oran		11 Lap ora n		11 Lap ora n		11 Lapo ran		11 Lapo ran		11 Lapo ran		11 Lapo ran		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.850.307.548		4.199.394.792		4.431.204.558		4.533.122.263		4.637.384.075		4.744.043.909		4.853.156.918	
Meningkatnya penatausahaan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Realisasi Anggaran	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.208.882.548		3.441.728.992		3.670.259.558		3.754.675.528		3.841.033.065		3.929.376.824		4.019.752.492	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Ora ng		30 Ora ng		30 Ora ng		30 Oran g		30 Oran g		30 Oran g		30 Oran g		
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			611.425.000		743.425.000		745.945.000		763.101.735		780.653.075		798.608.096		816.976.082	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PEGAWAI (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SAT UAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok ume n		12 Dok ume n		12 Dok um en		12 Dok ume n		12 Doku men		12 Dok ume n		12 Doku men		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			15.000.000		6.790.000		7.000.000		7.161.000		7.325.703		7.494.194		7.666.561	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap oran		1 Lap ora n		1 Lap ora n		1 Lapo ran		1 Lapo ran		1 Lapo ran		1 Lapo ran		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD			15.000.000		7.450.800		8.000.000		8.184.000		8.372.232		8.564.793		8.761.784	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	16 Lap oran		16 Lap ora n		16 Lap ora n		16 Lapo ran		16 Lapo ran		16 Lapo ran		16 Lapo ran		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			42.355.000		52.386.000		22.125.000		22.633.875		23.154.454		23.687.007		24.231.808	
Meningkatnya pelaksanaan administrasi	Terlaksananya administrasi kepegawain perangkat daerah	100, 00		100, 00		100, 00		100, 00		100, 00		100, 00		100, 00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PEGAWAI (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SAT UAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
kepegawaian perangkat daerah																
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			42.355.000		52.386.000		22.125.000		22.633.875		23.154.454		23.687.007		24.231.808	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang		1 Orang		1 Orang		1 Orang		1 Orang		1 Orang		
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0		0		7.000.000		7.161.000		7.325.703		7.494.194		7.666.561	
Meningkatnya penatausahaan administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase penatausahaan administrasi barang milik daerah yang dilaksanakan	0		0		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0		0		7.000.000		7.161.000		7.325.703		7.494.194		7.666.561	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0		0		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			496.744.300		533.621.550		474.643.300		485.560.096		496.727.978		508.152.722		519.840.234	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			114.000.000		114.000.000		114.000.000		116.622.000		119.304.306		122.048.305		124.855.416	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PEGAWAI (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SAT UAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Pak et		12 Pak et		12 Pak et		12 Pake t		12 Pake t		12 Pake t		12 Pake t		
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0		0		18.760.000		19.191.480		19.632.884		20.084.440		20.546.383	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	0		0		3 Pak et		3 Pake t		3 Pake t		3 Pake t		3 Pake t		
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			382.744.300		349.024.050		317.121.700		324.415.499		331.877.056		339.510.228		347.318.963	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Pak et		12 Pak et		12 Pak et		12 Pake t		12 Pake t		12 Pake t		12 Pake t		
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu			0		0		7.500.000		7.672.500		7.848.968		8.029.494		8.214.172	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0		0		1 Lap ora n		1 Lapo ran		1 Lapo ran		1 Lapo ran		1 Lapo ran		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0		0		17.261.600		17.658.617		18.064.765		18.480.255		18.905.300	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0		0		1 Lap ora n		1 Lapo ran		1 Lapo ran		1 Lapo ran		1 Lapo ran		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			171.630.000		135.960.000		152.040.000		155.536.920		159.114.269		162.773.897		166.517.697	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PEGAWAI (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SAT UAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya jangka waktu pengoperasian barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di fasilitasi	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			171.630.000		135.960.000		152.040.000		155.536.920		159.114.269		162.773.897		166.517.697	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			213.210.200		0	0	34.891.600	100,00	35.694.107	100,00	36.515.071	100,00	37.354.918	100,00	38.214.081	
Meningkatnya jumlah pengadaan barang penunjang urusan milik daerah	Persentase pengadaan barang penunjang urusan milik daerah yang dilaksanakan	100,00		0												
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			213.210.200		0		34.891.600		35.694.107		36.515.071		37.354.918		38.214.081	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 Unit		0		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		
	Domain Layanan SPBE	Nilai	3,69	3,70		0		0		0		0		0		
	Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PemDi)	Nilai	0	0		3,10		3,25		3,46		3,52		3,76		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PEGAWAI (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SAT UAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Aplikasi Informatika			994.011.500		3.487.262.000		415.000.000		424.545.000		434.309.535		444.298.654		454.517.523	
Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan e-government di lingkungan perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Website Aktif	100,00		60,00		75,00		85,00		90,00		95,00		100,00		
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			994.011.500		3.487.262.000		415.000.000		424.545.000		434.309.535		444.298.654		454.517.523	
Meningkatnya kualitas pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang	Persentase perangkat daerah yang menerapkan e-government	100,00		60,00		75,00		85,00		90,00		95,00		100,00		
Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi			0		0		27.300.000		27.927.900		28.570.242		29.227.357		29.899.586	
Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/ atau Portal Data Nasional	0		0		4 Lay ana n		4 Laya nan		4 Laya nan		4 Laya nan		4 Laya nan		
Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana			994.011.500		3.212.262.000		25.113.200	3 Apli kasi	25.690.804	3 Aplik asi	26.281.692	3 Aplik asi	26.886.171	3 Aplik asi	27.504.553	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PEGAWAI (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SAT UAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE																
Terlaksananya Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas			0		0		16.567.70 0		16.948.75 7		17.338.57 8		17.737.36 6		18.145.32 6	
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Tulang Bawangi Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten Tulang Bawangi Cerdas	0		0		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE			0	0	0		86.019.10 0		87.997.53 9		90.021.48 3		92.091.97 7		94.210.09 2	
Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	0		0		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet			0		275.000.0 00		260.000.0 00		265.980.0 00		272.097.5 40		278.355.7 83		284.757.9 66	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PEGAWAI (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SAT UAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet	Jumlah PD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh dinas	1 Perang kat Daerah		1 Pera ngk at Dae rah		1 Per ang kat Dae rah		1 Pera ngka t Daer ah		1 Pera ngka t Daer ah		1 Pera ngka t Daer ah		1 Pera ngka t Daer ah		
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	94,96	95,50		96,20		97,00		97,70		98,40		99,00		
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik			5.785.64 9.000		2.054.078 .800		2.010.000. 000		2.056.230. 000		2.103.523. 290		2.151.904. 326		2.201.398. 125	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) (%)	81,5 0		65,0 0		70, 00		75,0 0		80,0 0		85,0 0		90,0 0		
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			5.785.64 9.000		2.054.078 .800		2.010.000. 000		2.056.230. 000		2.103.523. 290		2.151.904. 326		2.201.398. 125	
Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kab. Tulang Bawang	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (%)	65,0 0		65,0 0		70, 00		75,0 0		80,0 0		85,0 0		90,0 0		
Sub Kegiatan Relasi Media			5.362.00 7.000		1.915.866 .700		1.800.000. 000		1.841.400. 000		1.883.752. 200		1.927.078. 501		1.971.401. 306	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PEGAWAI (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SAT UAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	3 Lap oran		3 Lap ora n		3 Lap ora n		3 Lapo ran		3 Lapo ran		3 Lapo ran		3 Lapo ran		
Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik			30.000.000		13.685.000		70.000.000		71.610.000		73.257.030		74.941.942		76.665.606	
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Per moh o nan		12 Per moh o nan		12 Per mo ho nan		12 Per moh o nan		12 Perm oho nan		12 Perm oho nan		12 Perm oho nan		
Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik			0		0		30.000.000		30.690.000		31.395.870		32.117.975		32.856.688	
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	0		0		1 Rek ome n dasi		1 Reko men dasi		1 Reko men dasi		1 Reko men dasi		1 Reko men dasi		
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik			51.348.100		69.769.000		30.000.000		30.690.000		31.395.870		32.117.975		32.856.688	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PEGAWAI (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SAT UAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>	<i>Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis</i>	4 Med ia		4 Med ia		4 Med ia		4 Medi a		4 Medi a		4 Medi a		4 Medi a		
Sub Kegiatan Diseminasi Informasi			0		0		50.000.00 0		51.150.00 0		52.326.45 0		53.529.95 8		54.761.14 7	
<i>Terlaksananya Diseminasi Informasi</i>	<i>Persentase khalayak yang terpapar informasi publik</i>	0		0		22 Pers en		24 Pers en		26 Perse n		28 Perse n		30 Perse n		
Sub Kegiatan Penyusunan Konten			91.293.9 00		54.758.10 0		30.000.00 0		30.690.00 0		31.395.87 0		32.117.97 5		32.856.68 8	
<i>Terlaksananya Penyusunan Konten</i>	<i>Jumlah Konten Informasi Publik</i>	3 Kon ten		3 Kon ten		365 Kon ten		365 Kont en		365 Kont en		365 Kont en		365 Kont en		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai	0,0	2,21		2,37		2,53		2,71		2,90		3,10		
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			40.000.0 00		10.444.00 0		65.000.00 0		66.495.00 0		68.024.38 5		69.588.94 6		71.189.49 2	
Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	<i>Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar serta cakupan ketersediaan data dasar pembangunan (%)</i>	100, 00		100, 00		100 ,00		100, 00		100, 00		100, 00		100, 00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PEGAWAI (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SAT UAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			40.000.000		10.444.000		65.000.000		66.495.000		68.024.385		69.588.946		71.189.492	
Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah Kab. Tulang Bawang	Persentase Perangkat Daerah yang Penyelenggaraan Satistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten Tulang Bawang (%)	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Sub Kegiatan Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional			0		0		25.000.000		25.575.000		26.163.225		26.764.980		27.380.574	
Terlaksananya Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	0		0		55%		59%		62%		65%		70%		
Sub Kegiatan Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral			0		0		20.000.000		20.460.000		20.930.580		21.411.983		21.904.459	
Terlaksananya Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	0		0		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral			40.000.000		10.444.000		20.000.000		20.460.000		20.930.580		21.411.983		21.904.459	
Meningkatnya Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	80%		80%		80%		80%		80%		80%		80%		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PEGAWAI (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SAT UAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Siber dan Sandi	Nilai	0	2,40		2,70		3,00		3,30		3,60		3,90		
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			30.000.000		13.528.000		65.000.000		66.495.000		68.024.385		69.588.946		71.189.492	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)	40		50,00		60,00		70,00		75,00		80,00		85,00		
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000		13.528.000		65.000.000		66.495.000		68.024.385		69.588.946		71.189.492	
Meningkatnya Keamanan informasi milik pemerintah daerah Kab. Tulang Bawang melalui penyelenggaraan persandian	Persentase Data dan Sistem Informasi milik Pemerintah Daerah yang di amankan sesuai dengan prinsip manajemen keamanan informasi (%)	40		50,00		60,00		70,00		75,00		80,00		85,00		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			30.000.000		13.528.000		25.000.000		25.575.000		26.163.225		26.764.980		27.380.574	
Terlaksananya keamanan informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PEGAWAI (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SAT UAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sub Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan			0		0		20.000.00 0		20.460.00 0		20.930.58 0		21.411.98 3		21.904.45 9	
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	0		0		1 Lapora n		1 Lapora n		1 Lapora n		1 Lapora n		1 Lapora n		
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			0		0		20.000.00 0		20.460.00 0		20.930.58 0		21.411.98 3		21.904.45 9	
Terlaksananya Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	0		0		30 Perang kat Daera h		30 Perang kat Daerah		30 Perang kat Daerah		30 Perang kat Daerah		30 Perang kat Daerah		

Program , kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra tahun 2025-2029 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang yang telah disusun berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 berkaitan dengan Urusan Pemerintah Daerah yang memiliki tujuan dan outcome, lalu Nomenklatur Program beserta outcome dan indikator programnya mengikuti Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Nomenklatur program ini juga tercantum pada Kepmendagri 900.1.15.53406 Tahun 2024. Dalam menentukan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan harus *SMART* dan memperitmbangkan Program Prioritas Pembangunan Daerah Daerah. Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja

Adanya program, kegiatan dan subkegiatan yang telah di tetapkan maka selanjutnya menentukan sub kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2.	Program Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan protal pelayanan pemerintah daerah yang terintegrasi	
			Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Cerdas	
			Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
			Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet	
3.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			Sub Kegiatan Diseminasi Informasi	
			Sub Kegiatan Relasi Media	
			Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Sub Kegiatan Penyusunan Konten	
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional Sub Kegiatan Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	

4.2. Dukungan Sub Kegiatan Renstra PD pada RPJMN 2025-2029

Dukungan sub kegiatan Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029 adalah terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN. Renstra PD merupakan penjabaran dari RPJMN di level perangkat daerah, dan sub kegiatan di dalamnya menjadi bagian dari program dan kegiatan yang mengarah pada pencapaian sasaran RPJMN.

Renstra PD harus mengacu pada RPJMN sebagai dasar perencanaan. Renstra PD berperan sebagai dokumen perencanaan yang mengarahkan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 tahun ke depan, untuk itu diperlukan adanya penyelarasan Renstra PD Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung Asta Cita yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Dukungan sub kegiatan Renstra PD pada RPJMN 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Sub kegiatan pada PD yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pada RPJMN	Dukungan PD yang Merupakan Kewenangan Provinsi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Prioritas Nasional 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Sub Kegiatan Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media
		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		
2. Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Program Aplikasi Informatika	Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh dinas
		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa
3. Prioritas Nasional 7 Memperkua				

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pada RPJMN	Dukungan PD yang Merupakan Kewenangan Provinsi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			Pemerintah Desa	
	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan AS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Program Aplikasi Informatika		
		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa
		Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasar

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pada RPJMN	Dukungan PD yang Merupakan Kewenangan Provinsi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				kan Arsitektur SPBE pemerintah daerah
			Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh dinas

Proyek Strategis Nasional disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis yang utamanya mendukung dan memastikan pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama. RPJMN Tahun 2025–2029 memuat kebijakan Proyek Strategis Nasional. Perencanaan dan penyusunan Proyek Strategis Nasional dilakukan dengan menggunakan prosedur dan kriteria yang jelas, akuntabel serta mendukung pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Poyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025–2029. Proyek Strategis Nasional dapat diprakarsai/diusulkan dan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara maupun badan usaha swasta. Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh Pemerintah Pusat merupakan bentuk kontribusi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran-sasaran RPJMN yang memerlukan dukungan dari Pemerintah.

Untuk itu diperlukan intervensi Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah untuk mengintervensi arah pembangunan wilayah di Provinsi Lampung pada RPJMN 2025-2029. Intervensi perangkat daerah sangat

penting dalam arah pembangunan wilayah karena mereka memiliki wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang baik, dengan melibatkan perangkat daerah dan masyarakat, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, dan fisik secara berkelanjutan, intervensi sub kegiatan pada PD yang mendukung proyek nasional dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.5 Intervensi Perangkat Daerah Pada Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Lampung Dalam Rancangan Akhir RPJMN 2025-2029

Lokasi Prioritas Pada RPJMN	Highlight Indikasi Intervensi Pada RPJMN	Usulan / Identifikasi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Ouput Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nasional	Pengembang an Layanan Digital Pemerintah Terpadu	Program Aplikasi Informatika		
		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelengga raan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelola an Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa
		Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasar kan Arsitektur SPBE pemerintah daerah
			Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaat kan akses internet yang disediakan oleh dinas

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra adalah

pencapaian hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra. Target ini harus *SMART* yaitu spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achievable*), relevan (*relevant*), dan terbatas waktu (*time-bound*).

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika, dimana IKU Dinas Komunikasi dan Informatika yang disajikan merupakan indikator tujuan dan indikator sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika yang terseleksi.

Indikator kinerja berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja Utama adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Lebih lanjut penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang

NO	INDIKATOR	SATU AN	TARGET TAHUN					KET.	
			2025	2026	2027	2028	2029		2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Angka	95,50	96,20	97,00	97,70	98.40	99,00	Sasaran PD
2.	Domain Layanan SPBE	Angka	3,70	-	-	-	-	-	Sasaran PD
3.	Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PemDi)	Angka	-	3,10	3,25	3,46	3,52	3,76	Sasaran PD
4.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Angka	2,21	2,37	2,53	2,71	2,90	3,10	Sasaran PD
5.	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Siber dan Sandi	Angka	2,40	2,70	3,00	3,30	3,60	3,90	Sasaran PD
6.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	Angka	71,26	71,35	71,50	72,05	72,30	73,10	Sasaran PD

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam menjalankan tugas pemerintahan, baik tingkat pusat maupun daerah. Ini meliputi indikator-indikator yang dapat diukur untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah. Ini membantu dalam mengukur pencapaian target, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Penetapan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (PUD) melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan langkah penting dalam mencapai visi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025-2029. IKK berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah, membantu memperjelas tujuan, dan mengevaluasi pencapaian target.

Pemilihan Indikator pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang di susun berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang

NO	INDIKATOR	SATU AN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	Permendagri No 18 Tahun 2020
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan Terintegrasi	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	Permendagri No 18 Tahun 2020
3.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase (%)	60	61	62	63	64	65	Permendagri No 18 Tahun 2020
4.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	Permendagri No 18 Tahun 2020

NO	INDIKATOR	SATU AN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah								
5.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	Permendagri No 18 Tahun 2020
6.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persentase (%)	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00	Permendagri No 18 Tahun 2020

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan urusan komunikasi informatika, statistik dan persandian merupakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini tercantum dalam Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari organisasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang , Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang ini mengacu sepenuhnya pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Keselarasan keduanya senantiasa harus dipelihara secara dinamis. Perubahan yang terjadi pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan berakibat pula pada penyesuaian dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 – 2029 ini diharapkan untuk dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang secara keseluruhan. Diseminasi Renstra ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan kelak akan diukur dengan demikian, seluruh kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang direncanakan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan strategis.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 dengan mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Penutup BAB V Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 – 2029. Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 menjadi pedoman utama dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan harus dilaksanakan secara konsisten dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 termasuk setiap unit kerja di dalamnya, sesuai struktur Perangkat Daerah (PD), berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 dan kegiatan yang ada di dalam Renstra Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya yang didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Masyarakat;
- b. Kepala Dinas, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan organisasi Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana Kerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan aparatur yang ada;
- c. Sekretaris, berkewajiban untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Kerja yang ada dalam Renstra Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029;
- d. Setiap unit kerja di lingkungan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029, dalam hal ini Kepala Bidang dan Sekretaris berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029, untuk menjamin konsistensi

dan kontinuitas program, kegiatan serta pendanaan dan disusun sesuai dengan tugas Penutup BAB V Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 – 2029 Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang pokok dan fungsinya di setiap unit kerja dengan memprioritaskan kegiatan unggulan/utama yang merupakan tujuan bersama;

- e. Untuk merealisasikan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 yang penuh tantangan dan dinamika pembangunan.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan

Evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan RKT dilakukan pada akhir tahun terhadap indikator kinerja misi, program dengan data yang diperoleh dari Kabupaten/Kota untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka clean government and good governance (masyarakat dan pemerintahan).

Selanjutnya evaluasi kinerja tersebut sebagai pedoman bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, penyusunan Laporan Penutup BAB V Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 – 2029 Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 kepada Bupati Tulang Bawang, dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Perangkat Daerah (LPPD) Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang. Laporan - laporan tersebut merupakan pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang kepada Bupati Tulang Bawang atas pelaksanaan penyelenggaraan keberadaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang selanjutnya akan diperiksa, di evaluasi dan dinilai Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang; Demikian Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029, selama kurun waktu 5 tahun yang diselaraskan dengan Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Terlaksananya penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 akan sangat ditentukan oleh partisipasi seluruh aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya. Tercapainya keberhasilan juga sangat ditentukan oleh dukungan berbagai pihak, kebijakan pimpinan di tingkat provinsi dan tersedianya anggaran yang memadai, baik anggaran belanja administrasi umum dan ataupun anggaran belanja operasional dari beberapa program dan berbagai jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029.